

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian Internal (*Internal Control*)

2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern

The Committee of Sponsoring Organization (COSO) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh *board of directors* (BOD), manajemen, dan personel lain entitas, yang didesain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang digolongkan menjadi efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (COSO:2013:3).

Melalui pengertian diatas, COSO memberikan penekanan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses, yaitu sebagai media untuk mencapai tujuan dan bukan merupakan tujuan itu sendiri.

2.1.2 Tujuan Pengendalian Intern

Tiga tujuan pengendalian intern menurut COSO:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi,
2. Keandalan pelaporan keuangan, dan
3. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

2.1.3 Komponen Pengendalian Intern

Komponen-komponen pengendalian intern menurut COSO:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang menyediakan dasar untuk melaksanakan pengendalian intern di dalam organisasi. (COSO:2013:4).

Lingkungan pengendalian terdiri dari:

- a. Integritas dan nilai etika

- b. Komitmen untuk memiliki kompetensi
- c. Perhatian dan pengarahan oleh dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit
- d. Filosofi manajemen dan gaya operasi
- e. Struktur organisasi
- f. Penunaian wewenang dan tanggung jawab
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Penilaian risiko adalah penilaian terhadap berbagai risiko yang dihadapi organisasi baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Penilaian risiko dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetapkan tujuan yang konsisten antar berbagai tingkat organisasi. Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis risiko, hasil identifikasi dan analisis risiko digunakan sebagai dasar penanganan risiko. (COSO:2013:6).

Penilaian risiko terdiri dari:

- a. Identifikasi risiko
 - b. Analisis risiko
- ## 3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian yaitu tindakan ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan yang dilakukan.

Aktivitas pengendalian terdiri dari:

- a. Persetujuan dan otorisasi
 - b. Verifikasi dan rekonsiliasi
 - c. Reviu kinerja
 - d. Pengamanan aset
 - e. Pemisahan tugas
- ## 4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi adalah informasi yang diperlukan entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian intern untuk mendukung pencapaian tujuannya. Komunikasi adalah proses yang terus menerus, berulang dalam menyediakan, berbagi dan memperoleh informasi yang diperlukan (COSO:2013:5).

Informasi dan komunikasi terdiri dari:

- a. Informasi

b. Komunikasi

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah evaluasi yang sedang berlangsung, evaluasi terpisah, atau beberapa kombinasi dari keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian intern, termasuk kontrol memiliki efeknya masing-masing (COSO:2013:5).

Pemantauan terdiri dari:

a. Pemantauan berkelanjutan

b. Evaluasi terpisah

2.1.4 Penjelasan Komponen

1. Lingkungan Pengendalian

- a. Para manajemen tingkat atas menunjukkan komitmen atas integritas dan nilai etika
- b. Dewan komisaris dan dewan direksi memahami dan melaksanakan tanggung jawab pengawasan
- c. Filosofi dan gaya operasi manajemen mendukung pelaksanaan pengendalian intern yang efektif
- d. Struktur organisasi mendukung terciptanya pengendalian intern yang efektif.
- e. Organisasi mempertahankan personel yang kompeten dan memiliki peran pengawasan
- f. Para manajer dan pegawai diberi kewenangan dan tanggung jawab yang memadai.

2. Penilaian Risiko

- a. Menetapkan secara spesifik tujuan-tujuan yang relevan
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko
- c. Menilai risiko kecurangan

3. Aktifitas Pengendalian

- a. Memilih dan membangun aktivitas pengendalian
- b. Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang Tangguh
- c. Mengendalikan teknologi informasi

4. Informasi dan Komunikasi

- a. Informasi yang berguna dan penting harus diidentifikasi, dicatat, diolah dan didistribusi secara tepat
 - b. Berkomunikasi secara intern
 - c. Berkomunikasi dengan pihak eksternal
5. Pemantauan
- a. Melaksanakan pemantauan secara berkala
 - b. Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan

2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah turunan dari pengendalian internal COSO yang diterapkan bagi bisnis pada tahun 1992 dan sekarang diterapkan di pemerintahan sebagai sistem pengendalian intern pemerintah pada tahun 2008, lalu menjadi peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.

2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengendalian internal di instansi pemerintah di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut dikatakan bahwa pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, tujuan SPIP untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Keyakinan memadai tersebut ditunjukkan dengan melalui :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara
2. Keandalan laporan keuangan

3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

2.2.3 Komponen Pengendalian Intern Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 , komponen pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian artinya pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Lingkungan pengendalian terdiri dari :

- a. Penegakkan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Peran Aparat Pengawas Instansi Pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah yang bersumber dari internal maupun eksternal.

Penilaian risiko terdiri dari:

- a. Identifikasi risiko
- b. Analisis risiko

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

Kegiatan pengendalian terdiri dari:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah terkait
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas mpengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset
- e. enetapan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian penting
- i. Pembatasan akese atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal.

Informas dan Komunikasi terdiri dari:

- a. Informasi
 - b. Komunikasi
 - c. Bentuk dan sarana komunikasi
- #### 5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada Instansi Pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Pemantauan pengendalian intern terdiri dari:

- a. Pemantauan berkelanjutan
- b. Evaluasi terpisah
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

2.2.4 Penjelasan Komponen

1. Lingkungan Pengendalian

a. Penegakkan integritas dan nilai etika

Penetapan nilai-nilai etika dalam praktiknya dituangkan dalam bentuk kode etik atau aturan perilaku yang tertulis bertujuan untuk membangun suatu komunitas yang solid yang memiliki sikap dan perilaku yang sama dalam menyikapi berbagai kejadian atau kondisi tertentu dalam berorganisasi.

Pimpinan instansi sekurang-kurangnya melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku
- 2) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi pemerintah
- 3) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku
- 4) Menghapus kebijakan atau penugasan yang memberikan ruang untuk berperilaku tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Kompetensi harus berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menentukan kerja seseorang, jadi komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dengan keahlian untuk pekerjaan tertentu.

Pimpinan instansi sekurang-kurangnya harus melakukan tindakan:

- 1) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada setiap posisi dalam instansinya.
- 2) Menyusun standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut.
- 3) Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi dirinya.

- 4) Memilih pimpinan instansi yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansinya.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif adalah kepiawaian seseorang pemimpin organisasi yang dapat menciptakan suasana yang kondusif yang mampu mendorong proses pemotivasian stafnya agar mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pimpinan instansi sekurang-kurangnya harus melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan
- 2) Menerapkan manajemen berbasis kinerja di instansinya
- 3) Mendukung penerapan sistem pengendalian instansi pemerintah
- 4) Melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah
- 5) Melakukan interaksi secara intensi dengan pejabat pada tingkatan lebih rendah
- 6) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Struktur organisasi hendaknya dirancang cukup untuk mengakomodasi adanya perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pimpinan instansi harus melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi.
- 2) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi.
- 3) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi.
- 4) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan strategis.

5) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pemberian wewenang hendaknya dilakukan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Pimpinan instansi sekurang-kurangnya harus melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai.
- 2) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen.
- 3) Supervisi secara periodik yang memadai terhadap pegawai.

g. Peran Aparat Pengawas Instansi Pemerintah yang efektif.

Peran APIP diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- 1) APIP yang independen, melakukan pengawasan atas kegiatan instansi pemerintah
- 2) APIP membuat laporan hasil pengawasan, setelah melaksanakan tugas pengawasan
- 3) Untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan APIP, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Pimpinan instansi sekurang-kurangnya harus melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya.

- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya.
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya.

2. Penilaian Risiko

a. Identifikasi risiko

- 1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
- 2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari factor eksternal dan internal.
- 3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

b. Analisis risiko

- 1) Menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan.
- 2) Mengidentifikasi risiko dari faktor eksternal dan internal.
- 3) Menerapkan prinsip kehati-hatian yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan.

3. Kegiatan Pengendalian

- a. Review atas kinerja Instansi pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas asset
- e. Penetapan dan review atas indicator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan Komunikasi
 - a. Memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas
 - b. Melakukan komunikasi informasi secara intern
 - c. Menjalinkan komunikasi dengan pihak-pihak eksternal
5. Pemantauan Pengendalian Intern
 - a. Pemantauan yang berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan instansi pemerintah.
 - b. Evaluasi terpisah adalah kegiatan membandingkan hasil atau persepsi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 - c. Tindaklanjut atas rekomendasi hasil audit adalah penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu sesuai ketentuan.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan menurut PSAK Nomor 1 adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Laporan keuangan menyajikan informasi sebagai berikut :

1. Liabilitas
2. Ekuitas
3. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian

4. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
5. Arus Kas.

2.3.2 Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Standar ini adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan dan penyajian laporan keuangan dan digunakan untuk entitas atau perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusi contohnya seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan dan BUMN.

Pada tahun 2015 PSAK resmi mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang merupakan kelanjutan dari International Accounting Standards yang banyak dipakai sebagai standar akuntansi negara lain.

2.3.3 Jenis laporan keuangan

Menurut PSAK No 1, ada lima jenis laporan keuangan :

1. Laporan Posisi Keuangan / Neraca

Laporan posisi keuangan / neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan asset, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan:

- a. Aset, tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya.
- b. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor.
- c. Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang

ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan beban merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita perusahaan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menunjukkan berapa besar bagian atau porsi dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan yang diinvestasikan kembali ke perusahaan yang mempengaruhi besaran modal secara keseluruhan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setarakan dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini dibuat untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan hal-hal yang tertera dalam ke empat laporan keuangan lainnya. Bahkan dalam laporan keuangan ini juga disediakan penyebab atau alasan yang berkaitan dengan data yang tersaji dalam laporan keuangan.

2.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia , karakteristik kualitatif laporan keuangan ada empat yaitu:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang harusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

2.4 Laporan Keuangan Pemerintah

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 , laporan keuangan pemerintah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan . Entitas pelaporan merupakan unit pada pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah
3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat

4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010).

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.4.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010).

2.4.3 Jenis Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 , laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal,

penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera yang ada didalam seluruh laporan keuangan pemerintah , serta mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan.

2.4.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”

Empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Informasi yang relevan ialah sebagai berikut:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi yang andal adalah sebagai berikut:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

d. Substansi Mengungguli Bentuk

Peristiwa perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomik dan bukan hanya bentuk hukumnya.

e. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang

diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.5 Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien, dimana pengelolaan keuangan negara dapat dilaporkan secara andal, aset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan, maka semua operasi, sumber daya, dan data akan terkendali, tujuan akan tercapai, risiko dapat diminimalisir, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem tersebut akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

Sistem pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah didukung oleh Surat Edaran Mendagri nomor 900/918/SJ tanggal 8 Maret 2010 yang menyebutkan pentingnya penerapan SPIP pada pemda untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kinerja, pemerintah menerbitkan aturan/ kebijakan khusus tentang suatu hal tertentu, dan kebijakan teknis penerapan kebijakan keuangan daerah.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, sehingga

peneliti merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu yang serupa. Pengungkapan penelitian-penelitian terdahulu ini merupakan bentuk tanggung jawab moral peneliti atas penelitian ini dan juga merupakan bentuk terimakasih peneliti kepada peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian / Dimensi	Hasil Penelitian	Penelitian Sekarang
1	Nurul Husna, M. Rasyidin dan Ainun Zairinah, 2017 (Jurnal)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	Variabel X : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dimensi X : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penaksiran Risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Variabel Y : Laporan Keuangan Dimensi Y : 1. Keterandalan 2. Ketepatan Waktu	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Aceh Utara.	Variabel X: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dimensi X: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern Variabel Y : Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Dimensi Y : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami
2	Moch. Irfan Islamy, 2016 (Skripsi)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Variabel X : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dimensi X : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penaksiran Risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan	Sistem Pengendalian Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung	Variabel X: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dimensi X: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian / Dimensi	Hasil Penelitian	Penelitian Sekarang
			Variabel Y: Keandalan Laporan Keuangan Dimensi Y: 1. Penyajian Jujur 2. Substansi Mengungguli Bentuk 3. Netralitas 4. Kelengkapan	Barat.	Pengendalian Intern Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dimensi Y : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami
3	Hanifah, Dra, M.Si, 2019 (Jurnal)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan keuangan Pada BPKAD Kabupaten Garut	Variabel X1: Standar Akuntansi Pemerintahan Dimensi X1: 1. Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya 2. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Variabel X2: Sistem Pengendalian Intern Dimensi X2: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penaksiran Risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan Dimensi Y : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Garut	Variabel X: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dimensi X: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dimensi Y : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami
4	Silviana	Pengaruh	Variabel X1:	Pengawasan	Variabel X:

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian / Dimensi	Hasil Penelitian	Penelitian Sekarang
	DR, SE., M.Si., Ak.,C.A. (Jurnal)	Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung	<p>Pengawasan Keuangan Daerah</p> <p>Dimensi X1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 2. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 3. Pendapatan dan belanja daerah <p>Variabel X2 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>Dimensi X2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penaksiran Risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi <p>Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Dimensi Y :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami 	Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>Dimensi X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern <p>Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah</p> <p>Dimensi Y :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami
5	Dr. Diana Sari, S.E.,M.Si., Ak., Q.I.A., C.A., 2013 (Jurnal)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Pemerintah Daerah di	<p>Variabel X1: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>Dimensi X1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi 2. Kegiatan operasi dilaksanakan secara efisien 3. Keamanan aset 4. Kegiatan dan keputusan organisasi <p>Variabel X2: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>Dimensi X2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur 2. <i>Recognition</i> 3. <i>Measurement</i> 	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit berpengaruh positif Terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<p>Variabel X: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>Dimensi X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern <p>Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian / Dimensi	Hasil Penelitian	Penelitian Sekarang
		Provinsi Jawa Barat dan Banten.	3. <i>Presentation</i> 4. <i>Disclosure</i> Variabel X3: Penyelesaian Temuan Audit Dimensi X3: 1. <i>Financial and Compliance Audits</i> 2. <i>Economy and Efficiency Audits</i> 3. <i>Programe Result Audits</i> Variabel Y : Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dimensi Y : 1. Transparansi 2. Keterbukaan 3. Akuntabilitas 4. Partisipasi 5. Keadilan 6. Kemandirian		Dimensi Y : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami
6	Silviana DR, SE., M.Si., Ak.,C.A. , Erwin Antoni , 2014 (Jurnal)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah , Survey pada Pemerintah Kabupaten di Seluruh Jawa Barat	Variabel X : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dimensi X : 1. Mendokumentasikan 2. Mengadministrasikan 3. Mengolah data pengelolaan keuangan daerah Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dimensi Y : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat Dipahami	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah , Survey pada Pemerintah Kabupaten di Seluruh Jawa Barat	Variabel X: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dimensi X: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dimensi Y : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian / Dimensi	Hasil Penelitian	Penelitian Sekarang
					dipahami

2.6 Kerangka Pemikiran

Setiap entitas, termasuk pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, asas umum tersebut sesuai isi pasal 4 dari Peraturan Pemerintah dimaksud, yaitu :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan-peraturan dibidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah agar dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

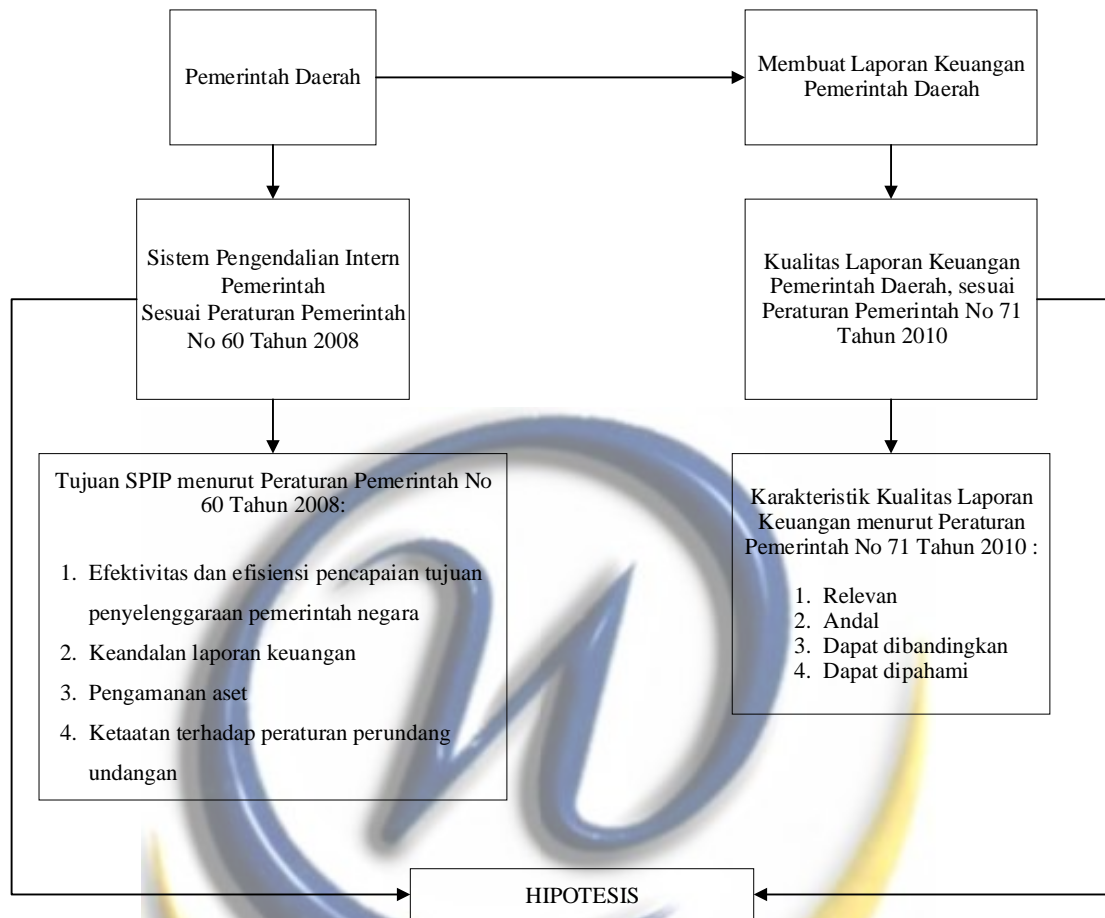
Pemerintah daerah harus dapat menerapkan sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatannya. Pentingnya pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pengendalian intern salah satunya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah , semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 pasal 2 , SPIP bertujuan

untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Variabel sistem pengendalian intern diproyeksikan dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan sebagai variabel independen serta kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen, adapun karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian, maka peneliti bermaksud meng gambarkannya dengan suatu kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran peneliti, kerangka pemikiran akan disajikan sebagai berikut:

Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Disamping penerapan SAP, kualitas SDM, implementasi pengendalian intern juga yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi juga mempengaruhi proses akuntansi pemerintahan didalam menghasilkan keputusan yang berkualitas.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan dari kerangka pemikiran diatas, maka dapat digambarkan dengan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono:2017:47).

Maka penulis merumuskan hipotesis penelitian yang merupakan kesimpulan sementara dalam penelitian sebagai berikut:

Ha: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya.

H0: Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya.

